

PERMASAHAN BANGSA DI ABAD GLOBALISASI

Oleh: **Dr. Tjipto Subadi, M.Si**
Dosen Pendidikan Patematika FKIP dan Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

A. PENDAHULUAN

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan jamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh Bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan.

Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam wadah Nusantara. Semangat perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan itu merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. Semangat inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Selain itu nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta terbukti keandalannya.

Nilai-nilai perjuangan itu kini telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan telah mengalami perubahan (kalau tidak boleh dikatakan telah mengalami penurunan), hal ini disebabkan pengaruh globalisasi. Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan global. Di samping itu, isu global yang meliputi demokratisasi, HAM, materialisme, liberalisme, kapitalisme turut pula mempengaruhi keadaan nasional. Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Hingga membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara.

Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam era globalisasi dan masa yang akan datang kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing.

Pelajaran sejarah Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang berlangsung sejak tahun 1945 secara tak terduga berakhir pada tahun 1991. Hal ini ditandai dengan beberapa momentum yang terjadi di negara-negara eks-komunis seperti digulingkannya diktator-diktator di Rumania, Hungaria, dan Bulgaria, dirobohnya Tembok Berlin, dan yang paling menentukan adalah runtuhnya Uni Soviet, negara sentral komunisme, pada tahun 1991. Perang Dingin yang berlangsung selama beberapa dekade telah memanaskan suhu dunia dan menciptakan sebuah medan pertempuran politis, ideologis, kultural, dan militeristik. Namun setelah perang tersebut berakhir, dunia seolah mengalami kevakuman. Kemunculan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa yang selama Perang Dingin yang mempromosikan liberalisme dan kapitalisme secara psikologis menempatkannya sebagai satu-satunya yang dapat mengatur dunia tanpa perlawanan dari negara manapun. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dengan gencar mengampanyekan demokrasi, penegakan HAM, dan sistem pasar bebas ke negara-negara eks-komunis dan Dunia Ketiga, sebagai 'pengisi kevakuman' pasca Perang Dingin. Namun pada praktiknya, kampanye tersebut menimbulkan ketidak-puasan dari masyarakat internasional manakala Amerika Serikat memaksakan kehendaknya sendiri dan menerapkan standar ganda. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada perlakuannya terhadap Israel, Irak, Iran, dan Korea Utara. Isu-isu globalisasi yang mencakup HAM, demokrasi, liberalisasi, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup kerap kali digunakan untuk menyudutkan dan mendiskreditkan bangsa dan negara lain.

Dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya, globalisasi yang didengungkan negara-negara maju secara langsung maupun tidak langsung banyak berpengaruh pada tatanan sosial, politik, dan budaya bangsa lain termasuk Indonesia dan jelas akan berpengaruh pada kondisi spiritual bangsa.

Indonesia pada saat ini setidaknya dihadapkan pada tiga permasalahan utama, antara lain: (1) tantangan dan mainstream globalisasi, (2) permasalahan-permasalahan internal seperti korupsi, skandal Bank Century, rendahnya mutu pendidikan, kemiskinan, dll (3) penjagaan agar 'roh' dan semangat reformasi tetap berjalan pada relnya.

Permasalahan yang pertama dan kedua lebih didominasi oleh eksekutif dan legislatif sementara permasalahan ketiga hendaknya dijawab oleh setiap elemen masyarakat. (Tjipto Subadi, 2010:8)

B. DUA SISI YANG PARADOKS GLOBALISASI

Globalisasi dimaknai sebagai sebuah proses terintegrasinya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas Negara (trans-nasional). Dilihat dari perspektif historis, sesungguhnya globalisasi merupakan sebuah titik sejarah yang tak dapat lagi dikembalikan ke masa lalu (*point of no return*). Pada melinium ketiga ini globalisasi dimaknai sebagai sebuah proses terintegrasinya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah sistem global yang melintasi batas-batas Negara (*trans-nasional*). Interaksi social antara bangsa yang difasilitasi oleh berbagai media informasi yang canggih menggerakkan perubahan sosial di antara bangsa-bangsa di dunia dalam berbagai level (local, nasional, internasional) menjadi sangat dinamis. Di samping itu, pergerakan manusia dan barang di era global juga sangat dinamis dengan ditunjang oleh teknologi dan transportasi yang semakin canggih. Anthony Giddens (2002), seorang ilmuwan social terkemuka di Inggris, menamai tanda-tanda zaman ini sebagai *the runaway world* (dunia yang berlari). Dalam hal ini perubahan social yang terjadi disebuah pelosok bumi akan berpengaruh secara signifikan pada pelahan bumi yang lain. (Asykuri Ibnu Chamim, 2003: 258).

Globalisasi juga ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan internasional, negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan, perekonomian, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan global. Kondisi ini akan menumbuhkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju dan negara berkembang dan lembaga internasional, maupun antar negara berkembang. Disamping itu isu global yang meliputi demokratisasi, HAM, materialism, liberalisme, turut pula mempengaruhi keadaan nasional.

Globalisasi juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global dimana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia akan dibentuk oleh globalisasi tersebut, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia, disaat bangsa menghadapi pengaruh glabal seperti ini maka agama sangat

butuhkan, bangsa ini disamping Dasar Negara Pancasila disepakati sebagai ideology bangsa, pandangan hidup bangsa maka agama juga dijadikan sebagai dasar berilmu, dan beramal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Globalisasi memiliki dua sisi yang paradoks. Di satu sisi ia positif, globalisasi memberi dan membangkitkan harapan akan kesejahteraan umat manusia yang lebih baik, dalam sisi positifnya, globalisasi memberikan peluang besar bagi semua bangsa untuk berekspresi dan berapresiasi dalam ruang global terhadap berbagai fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik di bidang social, politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, teknomlogi, dan berbagai informasi lainnya. Namun pada sisi yang lain ia negatif, globalisasi tidak sepenuhnya ramah bagi kemanusiaan, karena ada banyak hal negatif yang ditimbulkannya, seperti ketidak siapan negara-negara dunia untuk bekerja sama sebagai komunitas yang hidup di bumi yang satu dalam mengatasi ketidakadilan global, kemiskinan, kerusakan lingkungan, perdamaian dunia.

Demikian juga wajah paradoksal globalisasi, sehingga respon atas globalisasi pun sangat beragam. Di satu sisi, glablisasi disambut sebagian besar Negara-negara di dunia sebagai jalan keluar baru perbaikan nasib umat manusia, sementara di sisi yang lain, kelompok-kelompok kritis ditengah masyarakat menolak sama sekali globalisasi karena dipandang sebagai bentuk baru penjajahan (*kolonialisme*) melalui cara-cara baru yang bersifat trans – nasional di bidang ekonomi, social pilotik dan budaya. Di samping itu, sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan sejarah umat manusia akibat perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, walaupun mereka tetap kritis terhadap dampak destruktif glablisasi bagi masyarakat.

B. PERMASALAHAN INTERNAL BANGSA

1. Korupsi

Masalah korupsi yang sudah mengakar harus bisa kita atasi, memang tidaklah mudah untuk memberantas para koruptor-koruptor karena mengingat dari yang terkecil sampai yang besarpun pernah melakukannya. Keadaan bangsa ini telah berada pada titik kritis dimana korupsi seakan-akan sudah menjadi bagian kehidupan para koruptor, SEMOGA bangsa ini sadar bahwa korupsi dapat merusak moral bangsa Indonesia dan mengotori hati nurani kita sendiri.

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden SBY seakan-akan merupakan langkah berani dan sekaligus menyiratkan

pengakuan keberadaan organisasi mafia hukum dalam praktik sistem peradilan pidana selama 65 tahun kemerdekaan Indonesia. Prof. Romli Atmasasmita Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) menjelaskan bahwa mafia hukum di Indonesia identik dengan *the web of the underworld government* yang memiliki kekuatan destruktif terhadap ketahanan negara dan kewibawaan pemerintah, termasuk lembaga penegak hukumnya. Pertaruhan nasionalisme dan keteguhan dalam pemberantasan mafia hukum sedang dalam ujian di mata masyarakat dalam negeri dan luar negeri.

Namun, pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bukanlah solusi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi keberadaan mafia hukum. Yang tepat seharusnya memperkuat keberadaan KPK serta koordinasi dan sinkronisasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Apa sebenarnya yang menjadi penyebab seseorang korupsi? Catatan Singgih (1974) dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), hambatan struktur sosial (7,08 %). Sementara itu Merican (1971) menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah (1) Peninggalan pemerintahan colonial (2) Kemiskinan dan ketidaksamaan (3) Gaji pegawai yang rendah (4) Persepsi yang populer (5) Pengaturan yang bertele-tele (f) Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Ainan (1982) juga memberi catatan bahwa beberapa sebab terjadinya korupsi antara lain: (a) Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna (b) Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes (c) Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap, dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. (e) Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan (f) Menurut kebudayaannya, orang Nigeria tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya (g) Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi. Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, tidak mendorong

perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tidak represif.

Bagaimana langkah-langkah untuk menanggulangi tindak korupsi? Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan penjelasan bahwa langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi sebagai berikut: a) Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. b) Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat. c) Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi. d) Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan meningkatkan ancaman. e). Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara yang diperkenalkan oleh Caiden di atas membenarkan (legalized) tindakan yang semula dikategorikan kedalam korupsi menjadi tindakan yang legal dengan adanya pungutan resmi. Selanjutnya celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi haruslah membantu kearah pencegahan korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya.

Myrdal (dalam Lubis, 1987) memberi saran penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, mengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang

menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula. Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (*practical problems*), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut: (1) Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh. (2) Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. (3) Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. (4) Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi. (5) Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya. (6) Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan "achievement" dan bukan berdasarkan sistem "ascription". (7). Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah. (8) Menciptakan aparat pemerintah yang jujur (9) Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. (10) Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Marmosudjono (Kompas, 1989) mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi.

2. Kasus di Bank Century

MASIH terasa dalam ingatan kita kurang lebih 10 tahun lalu, pascakrisis moneter melanda Indonesia, pemerintah Orba mengucurkan utang secara besar-besaran kepada para pemilik bank yang kolaps. Ditaksir mencapai Rp 150 triliun, kalau ditaksir dengan nilai saat ini sudah mencapai Rp 700 triliun atau 70 persen APBN 2009; suatu jumlah yang luar biasa besarnya.

Namun apa yang terjadi, ternyata para pemilik bank swasta tersebut lari ke luar negeri beserta utang-utangnya sehingga negara dirugikan ratusan triliun rupiah. Pasalnya, setelah aset mereka disita dan dijual ternyata tidak seimbang dengan nilai utang sehingga menjadi skandal perbankan terbesar di Indonesia. Itu dikenal dengan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Setelah 10 tahun berlalu, skandal itu terulang kembali meski dalam konteks lebih kecil dari sisi nilainya, yakni "hanya" berupa suntikan dana Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,762 triliun. Itu dikenal dengan skandal Bank Century atau skandal BLBI jilid II. Dalam skandal ini nilai kerugian negara mencapai kurang lebih Rp 5 miliar. Pasalnya, jika ditaksir nilai aset Bank Century (BC) hingga 2011 nanti saat LPS melepas kepemilikannya hanya Rp 1,5 triliun.

Seharusnya BC tidak perlu ditolong dan dibiarkan kolaps sebagaimana Bank Indover. Jika BC sampai ambruk, dapat dipastikan tidak akan berdampak terhadap perekonomian nasional karena kecilnya nilai aset BC bila dibandingkan dengan potensi perekonomian nasional.

Bank dalam kondisi sakit. Padahal dalam sejarahnya, sebelum merger tahun 2004 lalu Bank Century masih bernama Bank CIC. Waktu itu dalam kondisi sakit. Dari laporan keuangan 2003-2004, Bank CIC terus merugi. Namun setelah merger dan berganti nama menjadi Bank Century, total asetnya tahun 2005 mencapai Rp 13 triliun dan 2006 mencapai Rp 14,5 triliun (Suara Merdeka 3 September 2009). Sedangkan surat berharga luar biasa tahun 2005 sebesar Rp 2,49 triliun dan 2006 Rp 3,62 triliun. Namun total biaya operasi BC tahun 2005 minus Rp 177 miliar dan 2006 berubah menjadi plus Rp 99 miliar. Total aset tahun 2008 sebesar Rp 15,23 triliun ketika Rp 9,279 triliun di antaranya dana pihak ketiga. Padahal setelah ambruk, LPS hanya menjamin Rp 5,2 triliun dari dana pihak ketiga sehingga Rp 4,09 triliun tidak masuk dalam penjaminan LPS.

Diduga kebangkrutan Bank Century disebabkan karena dua deposan besar, yakni Putra HM Sampoerna dan jaringan bisnis keluarga bos Merco Grup Arifin Panigoro menarik dana. Putra HM Sampoerna diperkirakan menarik dana sebesar Rp 3 triliun sementara jaringan bisnis keluarga Arifin Panigoro Rp 1 triliun. Namun yang mengherankan, mengapa Menkeu Sri Mulyani melalui LPS berusaha keras untuk menyelamatkan Bank Century meskipun sudah dalam kondisi payah sekali dengan menyuntikkan dana Rp 6,762 triliun dalam empat periode. Bisa jadi

dimaksudkan untuk menyelamatkan dua deposan tersebut atau ada strategi lain. Tetapi yang jelas hal itu menciptakan skandal Bank Century seperti sekarang ini. Menkeu bukannya menghukum bankir nakal, tetapi justru berusaha menolongnya dari kebangkrutan.

Lebih mengherankan lagi mengapa Menkeu tidak pernah memberitahu Wapres Jusuf Kalla soal suntikan dana ke BC dan dilakukan sewaktu Presiden SBY berkunjung ke luar negeri? Padahal sebelumnya oleh DPR hanya diizinkan dana suntikan sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan demikian penyuntikan dana (*bailout*) tersebut tanpa konsultasi dengan DPR sehingga terjadilah penggelembungan suntikan dana ke BC hingga lebih dari Rp 5,4 triliun.

Suntikan. Adapun LPS sampai empat kali menyuntikkan dana ke Bank Century. Pertama pada 23 November 2008 senilai Rp 2,776 triliun (modal untuk mengembalikan rasio kecukupan modal/ CAR Bank Century dari negatif 3,53 persen menjadi 8 persen). Kedua pada 5 Desember 2008 senilai Rp 2,201 triliun. Ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,155 triliun untuk menutup kekurangan CAR berdasar hasil perhitungan BI. Keempat pada 21 Juli 2009 senilai Rp 630 miliar. Dengan demikian, total suntikan dana yang dikucurkan LPS mencapai Rp 6,762 triliun.

Ternyata dari surat berharga BC itu sebanyak 56 juta dolar adalah bodong. Pada 3 Nopember 2008, BC dinyatakan telah gagal bayar. Sementara pada 13 Nopember BI menyatakan BC tidak sistemik. Tetapi anehnya seminggu kemudian pada 21 Nopember, BI menyatakan BC sistemik dan menyerahkannya ke LPS. Dengan demikian, sesungguhnya LPS telah menerima barang yang sudah berkualitas buruk alias rongsokan. Maka tidaklah mengherankan jika LPS sempat menolak penyerahan karena semula menggunakan neraca pada 30 Oktober bukannya neraca 20 November. Padahal LPS menerima penyerahannya pada 21 Nopember 2008.

Padahal pada neraca 30 Oktober injeksi ke BC sebesar Rp 1,55 triliun, sementara pada neraca 20 November injeksi ke BC telah mencapai Rp 2,65 triliun dengan CAR 8 persen. Hal itu menunjukkan kualitas pengawasan di BI sangatlah buruk sehingga menyebabkan terjadinya skandal BC tersebut.

Sekarang ada yang perlu dipertanyakan kepada otoritas moneter terutama Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia. Pertama, mengapa terjadi perbedaan keputusan Bank Indonesia hanya dalam waktu seminggu dari nonsistemik menjadi

sistemik. Kedua, mengapa BI menggunakan neraca 30 Oktober bukan neraca 20 Nopember ketika menyerahkan BC ke LPS. Ketiga, Mengapa BI tidak memiliki laporan akuntan publik; bagaimana kualitas aset Bank Century yang ternyata bodong.

Maka tidaklah mengherankan jika KPK meminta BPK agar mengaudit BC, meski hingga sekarang DPR belum melakukan permintaan serupa kepada BPK. Siapa yang paling bertanggungjawab atas skandal Bank Century yang berpotensi merugikan negara lebih dari Rp 5 triliun tersebut?

3. Permasalahan Pendidikan

Pemenang Hadiah Nobel bidang ekonomi, Joseph Stiglitz, mendefinisikan globalisasi sebagai “integrasi lebih dekat antara negara dan penduduk dunia... melalui cara... penghancuran batas artifisial untuk arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan penduduk secara lintas batas.” Thomas Friedman dalam bukunya, *The World is Flat*, menulis bahwa dunia kini menjadi sebuah *tingkat lapangan permainan*.

Apa arti itu semua bagi lapangan pendidikan? Dengan bahasa mudah bisa dikatakan negara yang tidak menghasilkan lulusan tingkat dunia akan terjungkal di lapangan datar kompetisi—sebab di dunia yang datar, semua kompetitor memiliki peluang sama. Jadi siapa saja yang tak mampu meningkatkan kemampuan dalam kesempatan ini akan tertinggal di belakang. Lebih khusus lagi, peneliti pendidikan menemukan negara yang gagal membangun standar “pendidikan internasional”, secara negatif akan berpengaruh pada kondisi ekonomi, politik, dan masalah sosial dunia.

Seruan ini mengingatkan pentingnya melihat bagaimana standar pendidikan “internasional” di Indonesia; dan bagaimana setiap guru mempersiapkan muridnya untuk bersaing di dunia global secara kompetitif.

Pendidikan lokal pada semua tingkat masih jauh dari standar kompetitif global; termasuk juga di Indonesia. Laporan terakhir menunjukkan bahwa 4,5 juta lulusan pendidikan sekarang “masih menganggur.” Jumlah ini adalah lulusan sarjana dan diploma, termasuk lulusan SMA yang berasal dari pendidikan lokal. Para analisis menyebut ini masalah nasional karena rendahnya kemampuan guru dan kualitas belajar di Indonesia.

Maka tidak mengejutkan, dari sekitar 2,7 juta guru di negara ini, hanya 300.000 yang memiliki sertifikat mengajar. Para guru di Indonesia memiliki kendala berbagai macam termasuk minimnya pelatihan, rendahnya kualifikasi pendidikan, kecilnya gaji dan buruknya fasilitas pendukung. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menyatakan akan menaikkan anggaran gaji guru sebesar Rp 50 triliun di tahun 2009; dan menaikkan gaji hingga 100 persen bagi beberapa guru. Meski demikian, kompensasi penambahan gaji ini sendiri tidak otomatis meningkatkan kualitas guru untuk mencapai standar internasional.

Keahlian dasar sangat dibutuhkan di pasar tenaga kerja Indonesia dan ekonomi global membutuhkan keahlian berpikir kritis, keahlian memecahkan persoalan, berpikir dalam gambaran besar, keahlian komunikasi dan sebuah sikap terus belajar seumur hidup.

Peneliti pendidikan seperti Bates (2002) dan Martimore (2001) mengajukan beberapa jalan bagaimana guru bisa menyiapkan dirinya sendiri dan muridnya untuk menghadapi globalisasi. Mereka menemukan bahwa aktivitas dan proyek berbasis pelajaran adalah vital bagi pembangunan kritis dan pemikir independen dalam rangka mengasah keahlian pemecahan masalah. Di negara maju, metode ini secara cepat menggantikan pendekatan tradisional yang berpusat pada pengajaran guru yang hanya menerapkan komunikasi satu arah. Variasi dalam cara dan teknik mengajar mulai meningkat, dan ini diikuti oleh perubahan kurikulum. Sebagai contoh, penggunaan komputer dan kemampuan melihat informasi dari internet membawa ke informasi dunia. Dengan internet, informasi yang sama dapat diakses oleh guru di New York atau seorang guru di Papua.

Para guru seharusnya menggunakan riset internet, untuk memperbarui bahan pengajaran, dan menemukan metode cara mengajar yang lebih baik dari seluruh lembaga di belahan dunia. Dengan jalan ini, para guru tidak harus tergantung pada pelatihan yang diadakan negara, namun dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri secara otonom. Para siswa juga harus dilatih mencari pengetahuan secara independen dan memiliki sebuah sikap belajar terus-menerus, entah melalui internet atau sumber lain seperti buku, majalah, dan surat kabar. Terus belajar menjadi penting karena perubahan adalah satu-satunya kekuatan tetap dalam dunia global. Mereka yang gagal merubah diri hanya akan tertinggal di belakang atau keluar dari persaingan.

Para guru Indonesia secepatnya harus menerima kenyataan ini suka atau tidak, mereka akan dinilai oleh standar internasional dan akan dibandingkan dengan guru di seluruh dunia-lewat pemerintah, perusahaan multinasional, investor, orang tua dan siswa.

Jika guru Indonesia gagal memenuhi standar dunia, perusahaan multinasional akan memilih sumber daya dari mana pun untuk menutupi kekurangan pekerja kompeten; investor akan meragukan pemimpin masa depan bangsa; orang tua akan kecewa dan siswa berbakat akan memilih belajar di luar negeri. Saat Indonesia merayakan Hari Guru Nasional, kutipan Henri Brooks berikut penting direnungkan: “seorang guru adalah keabadian; dia tak dapat memberitahu kapan pengaruhnya berhenti“

Dalam globalisasi dunia, pengaruh guru di Indonesia amat besar pengaruhnya untuk kesuksesan bangsa. Diharapkan, suatu hari nanti, guru dan lulusan Indonesia akan memiliki kekuatan untuk diakui dalam percaturan globalisasi dunia. *Disadur dari makalah Kenneth Cock, Direktur Sampoerna Foundation Teacher Institute (SFTI) dengan judul “The Challenges of Globalization for Indonesian Teachers.”*

Namun pesimistis selalu membayangkan-bayangi jika kita melihat data rendahnya kualitas pendidikan kita, Danim, (2003) dalam Tjpto Subadi (2010) mengemukakan bahwa persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Sekolah Dasar saat ini bukan saja terletak pada sisi efisiensinya, tetapi juga masalah mutu, akses dan peluang pengembangan. Ditambahkan lebih lanjut, bahwa rendahnya efisiensi ditunjukkan oleh indikator seperti; (1) masih tingginya angka putus sekolah dan mengulang kelas. Berdasarkan hasil studi Bank Dunia penurunan angka putus sekolah antara tahun 1980 sampai 1991 dari 5,1% ke 3,5%. Sementara angka mengulang kelas rata-rata 10%. (2) masih rendahnya kemampuan membaca kritis pada siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan Studi IEA (dalam Achmadi, 1995) menunjukkan bahwa penguasaan membaca kritis siswa Sekolah Dasar sebesar 36,1%. Sementara Hidayat (dalam Danim, 2003) juga mengemukakan bahwa kemampuan siswa Sekolah Dasar untuk menjawab pertanyaan dengan benar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (47%), Matematika (49%) dan IPA (47%). Rendahnya tingkat efisiensi dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran tersebut di atas disebabkan antara lain oleh proses pembelajaran yang dilaksanakan, di mana prestasi belajar akademis lebih banyak

diterangkan oleh faktor-faktor sekolah (guru, buku paket, alat belajar, manajemen sekolah dan sebagainya) dari pada faktor luar sekolah.

Secara Nasional, kualitas pendidikan di Indonesia “sangat memprihatinkan” Data UNESCO (2000) tentang Peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*) yaitu di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 120 (1996), ke 105 (1998), dan ke 109 (1999). Menurut Survei *Political and Economic Risk Consultant* kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2002), Indonesia memiliki daya saing rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke 37 dari 57 negara yang di survei di dunia. Data Balitbang (2003) mencatat bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Primary Years Program* (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya 8 yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP), dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori *The Diploma Program* (DP).

Secara khusus kualitas guru (2002-2003) data guru yang layak mengajar, untuk SD hanya 21,07 % (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12 % (negeri) dan 60,09 % (swasta), untuk SMA 65,29 % (negeri) dan 64, 73 % (swasta), serta untuk SMK 55,49% (negeri) dan 58,26 % (swasta). Data *Trends in Mathematic and Science Study* 2003/2004 mencatat bahwa siswa Indonesia (SD) hanya berada di rangking ke 35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di rangking 37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam skala Internasional menurut Bank Dunia, Study IFA di Asia Timur menunjukkan ketrampilan membaca siswa kelas IV SD Indonesia berada pada tingkat rendah apabila dibandingkan dengan negara lain yaitu Hongkong 75,5%, Singapura 74 %, Thailand 65,1 %, sedangkan Indonesia berada pada posisi 51,7 %. (Tjipto Subadi, 2010: 153-158)

Data-data tersebut di atas maknanya terdapat masalah dalam sistem pendidikan Indonesia, pertama; masalah mendasar yakni kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan, kedua; masalah-masalah lain, yaitu berbagai problem yang berkaitan dengan aspek praktis/teknis penyelenggaraan pendidikan misalnya; biaya pendidikan, rendahnya

prestasi siswa, rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru dan sebagainya.

4. Kondisi Pendidikan Jawa Tengah

Kondisi pendidikan di Jawa Tengah, berdasarkan laporan data tahun 2002 untuk tingkat SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (AKP) mencapai 107,88 %, Angka Transisi (AT) sebesar 88,01% dan angka Drop Out (DO) sebesar 0,23 % atau sebanyak 9.488 murid. Sedangkan pada tingkat SLTP/MTs AKP sebesar 81,73 % sementara AT sebesar 51,24 % dan DO sebesar 0,82 % atau sebanyak 9.533 murid. Pada tingkat SLTA/MA AKP sebesar 41,76 % dan DO sebesar 0,80 % atau sebanyak 5.867 murid. (Repetada Propinsi Jawa Tengah, 2004: 119-120). Partisipasi lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) relatif rendah, karena berbagai faktor; diantaranya kondisi sosial dan ekonomi keluarga dan terbatasnya daya tampung PT.

Di samping itu, masih relatif tingginya penduduk buta aksara usia 10 tahun ke atas tercatat 792.418 orang dan untuk usia Wajar (Wajib Belajar) 7-15 tahun yang tidak sekolah sebanyak 162.491 anak. Pada sisi lain, perhatian dan keinginan masyarakat/swasta (dunia usaha dan industri) terhadap penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) masih sangat rendah, hal ini karena keterbatasan penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana.

Kualitas dan relevansi pendidikan yang belum sesuai sangat berkaitan dengan input-output proses pembelajaran tampak pada pencapaian ratio hasil ujian akhir, penerapan kurikulum yang padat, terbatasnya penyediaan prasarana/sarana pendidikan, rendahnya mutu, kesejahteraan dan kekurangan tenaga kependidikan serta terjadinya kekurang relevansi (*mismatch*) antara tamatan pendidikan dengan kualitas/standar kompetensi dan kebutuhan dunia usaha/industri.

Manajemen dan kemandirian sekolah juga masih lemah karena belum optimalnya keterlibatan sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan, sehingga pelaksanaan program manajemen berbasis sekolah yang telah dirintis sejak tahun 1999/2000 masih perlu mendapatkan fasilitasi dan pendampingan di dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan sekolah. Kondisi demikian menggambarkan bahwa pembangunan di bidang pendidikan belum optimal disebabkan keterbatasan dana serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, prioritas

pembangunan bidang pendidikan perlu dioptimalkan kembali sehingga terbentuk SDM yang bermutu baik melalui jalur sekolah maupun pendidikan luar sekolah yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar pasar kerja global.

Permasalahan, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah masih dihadapkan berbagai masalah: (a) kurangnya pemerataan pendidikan; (b) kurangnya kualitas pendidikan; (c) kurangnya relevansi pendidikan; (d) kurangnya efisiensi dan efektivitas pendidikan; (e) belum optimalnya manajemen dan kemandirian pendidikan. Di samping itu lebih diperberat lagi dengan oleh beberapa hal, antar lain; (a) terjadinya bencana alam di berbagai daerah; (b) pembaharuan sistem pengelolaan pendidikan (c) disparitas kemampuan pembiayaan antar daerah; (d) belum terwujudnya ketangguhan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi.

Kebijakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk; (a) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan dunia usaha dan industri; (b) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; (c) peningkatan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan; (d) peningkatan akuntabilitas, transparansi serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan melalui upaya peningkatan mutu manajemen berbasis sekolah sesuai standar pelayanan pendidikan yang ditetapkan; (e) pemberdayaan lembaga pendidikan baik formal maupun informal di dalam pembentukan dan pengembangan kualitas SDM sedini mungkin termasuk penguasaan IPTEK serta peningkatan imtaq secara terarah, terpadu dan keberlanjutan.

Sasaran, sasaran yang akan dicapai adalah; (a) meningkatnya kualitas pendidikan; (b) meningkatnya relevansi pendidikan; (c) meningkatnya efisiensi dan efektivitas pendidikan (e) meningkatnya manajemen dan kemandirian pendidikan.

Program, untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh melalui program sebagai berikut; (1) Pendidikan Dasar dan Prasekolah. Tujuan program ini adalah; (a) memperluas jangkauan dan daya tampung; (b) memberi kesempatan bagi kelompok kurang beruntung (terpencil, kumuh, miskin, daerah bermasalah, anak jalanan); (c) meningkatkan kualitas dan terselenggaranya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat; serta (d) meningkatkan efisiensi dan efektivitas sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi setempat. (2) Pendidikan Menengah. Tujuan dari program ini adalah; (a) memperluas jangkauan dan daya tampung; (b) meningkatkan kesempatan bagi kelompok minoritas dan terbelakang yang kurang beruntung; (c) meningkatkan kualitas kelulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya dan relevansi kebutuhan dunia kerja; (c) meningkatkan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat; (d) meningkatkan partisipasi masyarakat; dan (e) meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

D. Pengawal Roh Reformasi

Siapa pihak yang harus bertanggungjawab terhadap jalannya reformasi? Ini pertanyaan penting. Setidaknya, paling tidak, ada tiga pihak yang dapat menjalankan peran sebagai pengawal reformasi itu. **Pertama**, masyarakat luas pada umumnya, karena mereka bisa lebih jeli melihat jalannya perubahan. Dari amatan ini, pada gilirannya muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang berbuah sikap kritis masyarakat. **Kedua**, elit perguruan tinggi yang mengedepankan idealisme di balik reformasi yang terjadi. Di era 1965 ketika kekuasaan Orde Lama runtuh, mahasiswa UI dan elemen perguruan tinggi lainnya berperan sangat dominan dalam mendongkel kekuasaan Soekarno. Reformasi 1998 pun diawali oleh aktifis kampus. **Ketiga**, media cetak dan elektronik yang mampu memberikan akses informasi kepada masyarakat secara cepat dan objektif. Media merupakan pengawal reformasi yang paling ampuh dan efektif, namun dapat pula menjadi wahana untuk melegitimasi kekuasaan partai politik tertentu.

Reformasi dan Ideologi Bangsa. Ada hal yang cukup mengkhawatirkan sejak terjadinya reformasi di Indonesia Mei 1998, yaitu meredupnya semangat ideologi bangsa, Pancasila. Bahkan ada kecenderungan tokoh-tokoh bangsa enggan disebut Pancasilais, karena takut dikait-kaitkan dengan rejim Orde Baru. Adakah yang salah dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? ideologi Pancasila merupakan pilihan sadar para pendiri negara ketika mereka mendiskusikan berdirinya negara Republik Indonesia ini. Negara yang tidak memiliki fondasi ideologi, akan mudah diombang-ambing ideologi asing. Inilah sebabnya penting bagi bangsa ini untuk meluruskan jalannya reformasi dengan kawalan ideologi Pancasila melalui langkah-langkah sebagai berikut. **Pertama**, perlunya koreksi terhadap monotafsir ideologi Pancasila yang pernah dilakukan rejim Orde Baru agar jangan sampai terjebak ke dalam

truth-claim sepihak.. **Kedua**, Pancasila perlu didudukkan sebagai milik bangsa, bukan hanya milik penguasa.

Belum semua cita-cita bangsa dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi pertumbuhan suatu bangsa yang relatif masih muda (65 tahun), maka hasil yang dicapai dewasa ini tidak terlalu buruk, meskipun belum dapat dikatakan baik. Cita-cita yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 seperti: memajukan kesejahteraan umum (ekonomi), mencerdaskan kehidupan bangsa (pendidikan), dan melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia (pertahanan & keamanan) masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan dalam bidang ekonomi meliputi antara lain; masih tingginya pengangguran, besarnya utang luar negeri, kesenjangan ekonomi, kuatnya pengaruh kapitalisme.

Bidang pendidikan mengalami kemajuan, namun pada tingkat pendidikan tinggi (universitas) ia belum menyentuh lapisan bawah. Fasilitas pendidikan di pedesaan umumnya memprihatinkan, karena jauh dari akses pusat kekuasaan.

Bidang pertahanan keamanan Indonesia jauh tertinggal di bandingkan dengan Negara tetangga, Malaysia, Singapura, bahkan dengan Vietnam. Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dimiliki TNI dan Polri kebanyakan sudah berusia tua. Kendatipun demikian semangat untuk mempertahankan tanah air dari ancaman patut diacungi jempol. Dalam hal ini adagium yang dilontarkan Thomas Hobbes masih relevan, yaitu *Bellum pacis patter* (Perang bapak perdamaian), dan *Si Vis Pacem para bellum* (Jika ingin perdamaian siapkan perang).

DAFTAR PUSTAKA

- Bellone, Carl.1980.*Organization Theory and The New Public Administration*. United States Of America.Allyn and Bacon, Inc. Boston/ London Sydney/ Toronto.
- Chamim Ibn Asykuri. 2003. *Civic Education. Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Cock, Kenneth. 2009. *Tantangan Globalisasi bagi Guru Indonesia*. Negara yang tidak menghasilkan lulusan tingkat dunia akan terjungkal di arena persaingan. Senin, 4 Mei 2009, 11:05 WIB. www.sf-teacher.org.

- _____. *The Challenges of Globalization for Indonesian Teachers*. Direktur Sampoerna Foundation Teacher Institute (SF TI)
- Frederickson, George, H. 1984. *Administrasi Negara Baru*. Terjemahan. Jakarta. LP3ES. Cetakan Pertama.
- Kartono, Kartini. 1983. *Pathologi Sosial*. Jakarta. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
- Lamintang, PAF dan Samosir, Djisman. 1985. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Sinar Baru.
- Lubis, Mochtar. 1977. *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*. Jakarta. Bhratara. Karya Aksara.
- Mustansyir, Rizal. 2010. *Refleksi Atas Reformasi Indonesia*. www. [Inspirasi](#)'s Blog Membawa Pencerahan Bangsa.
- Revida, Erika. 2003. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*. Digitized by USU digital library 2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
- Saleh, Wantjik. 1978. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Subadi, Tjipto. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Surakarta. BP-FKIP UMS.
- _____. 2010. *Lesson Study Berbasis PTK Suatu Model Pembinaan Menuju Guru Profesional*. Surakarta. BP FKIP UMS.
- Simon, Herbert. 1982. *Administrative Behavior*. Terjemahan St. Dianjung. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- (www.lippostar.com/news/opinion)